



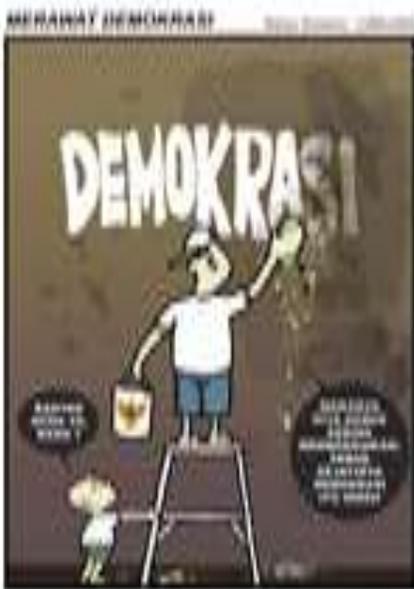
Laporan Kegiatan

TAHUN 2024

**PELAKSANAAN
KEGIATAN
PENDIDIKAN POLITIK
BAGI TOKOH
MASYARAKAT
KABUPATEN/KOTA DI
PROVINSI SUMATERA
BARAT
TAHUN 2024**



BIDANG POLITIK DALAM NEGERI BADAN KESBANGPOL PROV. SUMBAR



**BAB I
PENDAHULUAN**

A. LATAR BELAKANG

Arus besar reformasi memberikan dampak yang signifikan terhadap aspek-aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, pun dalam konteks demokrasi telah mengalami perubahan yang sangat fantastis dengan lebih meningkatnya peran serta masyarakat dan lembaga demokrasi dalam menentukan pilihan politiknya. Namun demikian, kebebasan dalam berpolitik, mengeluarkan pendapat dan kebebasan berbicara yang menjadi agenda reformasi tersebut tidak diapresiasi sebagaimana mestinya. Harapan Indonesia bisa lebih maju dan bermartabat agak sedikit terganggu, bahkan yang lebih parah lagi kini negara Indonesia dengan adat budaya ketimurannya telah terjadi dekadensi moral, bahkan hampir lupa dengan jati diri bangsanya.

Bila kita mencermati situasi dan kondisi yang begitu cepat dalam mengikuti perkembangan kemajuan teknologi dan pengaruh yang cukup masif, dari berbagai budaya bangsa-bangsa di dunia, serta tantangan dari kemajemukan bangsa, maka perlu upaya terus menerus dalam menguatkan nilai-nilai normatif agama dan budaya bangsa, termasuk meningkatkan fungsi dan tanggung jawab semua elemen masyarakat dalam kehidupan demokrasi, dalam upaya mewujudkan cita-cita masyarakat, bangsa dan negara.

Untuk mencapainya, perlu adanya komitmen bersama dalam membangun karakter bangsa, agar terbentuk kesepahaman bersama terhadap nilai-nilai kebangsaan yang lahir dan tumbuh dalam kehidupan bangsa dan pendewasaan berdemokrasi melalui pendidikan politik, oleh semua komponen bangsa. Pendidikan politik yang baik dapat mempengaruhi pembangunan budaya dan etika politik yang merupakan perwujudan nilai-nilai politik yang dianut baik sekelompok masyarakat maupun lembaga demokrasi, bangsa atau negara, yang diyakini sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan politik kenegaraan.

Mengingat pentingnya pengetahuan tentang politik bagi warga masyarakat dalam kehidupan berdemokrasi, kiranya perlu dilakukan pendidikan politik itu sendiri guna memajukan perkembangan dalam etika dan budaya politik agar lebih baik lagi, serta perlu juga diterapkan budaya politik yang partisipan dengan memperhatikan etika dalam berpolitik.

Kurangnya pengalaman maupun wawasan tentang pendidikan politik juga menjadi faktor pemicu bagi Masyarakat menjadi pasif dalam partisipasi politik. Kurang terdidiknya warga negara secara politik ini, telah menyebabkan mereka mudah dimobilisasi untuk kepentingan pribadi/jabatan dari para elite politik. Selebihnya mereka juga tidak bisa ikut

mempengaruhi secara signifikan proses-proses pengambilan keputusan yang berkaitan erat dengan kehidupan mereka.

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pada tahun 2024 akan di laksanakan Pemilihan Umum Serentak, pada tanggal 14 Februari Pemilihan Umum untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota dewan perwakilan rakyat (DPR) RI, dewan perwakilan daerah (DPD) RI, serta dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) provinsi dan kabupaten/kota. Sedangkan pada tanggal 27 November akan dilaksanakan Pilkada yang akan memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh Indonesia. Perhelatan pemilu serentak secara kolosal tersebut tentunya harus dipersiapkan dalam pelaksanaannya. Salah satu unsur penting yang harus dipersiapkan adalah partisipasi politik masyarakat, baik yang memilih maupun yang dipilih.

Kesediaan masyarakat dalam partisipasi politik dalam pemilu adalah sebuah Penanda bahwa Pemilu berjalan dengan aman dan sukses. Salah satu aktor yang harus mendorong partisipasi politik masyarakat adalah Pemerintah. Hal ini sesuai dengan amanah Pasal 434 UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu, di mana salah satunya Pemerintah wajib memberikan dukungan dan fasilitasi pendidikan politik bagi masyarakat.

Kegiatan Pendidikan Politik bagi tokoh Masyarakat yang dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat, bertujuan untuk meningkatkan peran tokoh masyarakat dalam menyampaikan pentingnya berpolitik dalam setiap kegiatan berbangsa dan bernegara khususnya dalam mewujudkan demokrasi yang baik. Selain itu Pendidikan Politik bagi tokoh masyarakat ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran akan hak politik dan kewajiban sebagai warga Negara, agar masyarakat dengan sadar menggunakan hak pilihnya dalam menentukan siapa pemimpin mereka berikutnya, selain itu juga dapat meningkatkan wawasan dan pengetahuan masyarakat dalam menggunakan hak-hak politiknya, berpolitik secara santun, cerdas, sesuai dengan budaya Indonesia, guna menyongsong agenda demokrasi Pemilu Serentak Tahun 2024 nanti.

B. DASAR HUKUM

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitasi Pendidikan Politik;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Pelaporan Perkembangan Politik di Daerah;

- f. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata cara penghitungan, penganggaran dalam APBD, dan tertib administrasi pengajuan, penyaluran dan laporan pertanggung jawaban penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik.
- h. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- i. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 37 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Tugas dan Fungsi Badan Kesbang dan Politik Provinsi Sumatera Barat;
- j. DPA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1) Maksud

Adapun maksud dilaksanakannya kegiatan ini adalah dalam rangka meningkatkan pemahaman serta pengetahuan masyarakat terhadap proses politik dan demokrasi.

2) Tujuan

Adapun tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah guna menumbuhkan kesadaran warga negara untuk menggunakan hak politiknya dengan baik dan benar, serta untuk melahirkan masyarakat yang memiliki pengetahuan, mengerti nilai-nilai, dan memiliki keahlian yang diperlukan untuk mengaktualisasikan dan melestarikan nilai-nilai demokrasi berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

D. SISTIMATIKA PENULISAN

BAB I : PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

B. DASAR

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

2. Tujuan

BAB II : PELAKSANAAN KEGIATAN PENDIDIKAN POLITIK BAGI TOKOH MASYARAKAT DI KABUPATEN/KOTA DI SUMATERA BARAT

BAB III : HASIL YANG DICAPAI

BAB VII : PENUTUP

A. KESIMPULAN

B. SARAN

BAB II
PELAKSANAAN PENDIDIKAN POLITIK BAGI TOKOH MASYARAKAT
DI KABUPATEN/KOTA TAHUN 2024

1. KABUPATEN DHARMASRAYA

a. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Pendidikan Politik bagi Tokoh Masyarakat di Kabupaten Dharmasraya pada Tahun 2024 dilaksanakan sebanyak 2 (dua) angkatan dengan jumlah peserta sebanyak 150 (seratus lima puluh) orang yang berasal dari Tokoh Masyarakat Kabupaten Dharmasraya. Kegiatan Pendidikan Politik bagi Tokoh Masyarakat Kabupaten Dharmasraya dibuka secara resmi oleh Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat

b. Waktu, Tempat dan Peserta Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan Pendidikan Politik bagi Tokoh Masyarakat di Kabupaten Dharmasraya dilaksanakan pada :

- 1) Tanggal 8 s.d 9 Februari 2023, bertempat di Hotel Sakato Jaya Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya yang diikuti oleh sebanyak 75 orang peserta berasal dari Tokoh Masyarakat Kabupaten Dharmasraya.
- 2) Tanggal 9 s.d 10 Februari 2023, bertempat di Hotel Sakato Jaya Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya yang diikuti oleh sebanyak 75 orang peserta berasal dari Tokoh Masyarakat Kabupaten Dharmasraya.

c. Materi dan Narasumber

Adapun Materi dan Nara sumber yang disampaikan dalam kegiatan Pendidikan Politik bagi Tokoh Masyarakat di Kabupaten Dharmasraya, terdiri dari :

- Peran Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pemilu/Pilkada, yang disampaikan oleh Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat.
- Pemilu sebagai Wahana Pendidikan Politik, yang disampaikan oleh Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat.
- Pengawasan Partisipatif Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024, yang disampaikan oleh Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sumatera Barat
- Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024

2. KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

a. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Pendidikan Politik bagi Tokoh Masyarakat di Kabupaten Lima Puluh Kota pada Tahun 2024 dilaksanakan sebanyak 8 (delapan) angkatan dengan jumlah peserta sebanyak 1200 (seribu dua ratus) orang yang berasal dari Tokoh Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota. Kegiatan Pendidikan Politik bagi Tokoh Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota dibuka secara resmi oleh Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat.

b. Waktu, Tempat dan Peserta Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan Pendidikan Politik bagi Tokoh Masyarakat di Kabupaten Lima Puluh Kota dilaksanakan pada :

- 1) Tanggal 04 Februari 2024, bertempat di Galeri Gor Rawang Kota Payakumbuh yang diikuti oleh sebanyak 150 orang peserta berasal dari Tokoh Masyarakat Kota Payakumbuh.
- 2) Tanggal 05 Februari 2024, bertempat di Galeri Gor Rawang Kota Payakumbuh yang diikuti oleh sebanyak 150 orang peserta berasal dari Tokoh Masyarakat Kota Payakumbuh.
- 3) Tanggal 06 Februari 2024, bertempat di Galeri Gor Rawang Kota Payakumbuh yang diikuti oleh sebanyak 150 orang peserta berasal dari Tokoh Masyarakat Kota Payakumbuh.
- 4) Tanggal 07 Februari 2024, bertempat di Galeri Gor Rawang Kota Payakumbuh yang diikuti oleh sebanyak 150 orang peserta berasal dari Tokoh Masyarakat Kota Payakumbuh.
- 5) Tanggal 08 Februari 2024, bertempat di Mes Pemda Kabupaten Lima Puluh Kota yang diikuti oleh sebanyak 150 orang peserta berasal dari Tokoh Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota.
- 6) Tanggal 09 Februari 2024, bertempat di Mes Pemda Kabupaten Lima Puluh Kota yang diikuti oleh sebanyak 150 orang peserta berasal dari Tokoh Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota.
- 7) Tanggal 10 Februari 2024, bertempat di Mes Pemda Kabupaten Lima Puluh Kota yang diikuti oleh sebanyak 150 orang peserta berasal dari Tokoh Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota.
- 8) Tanggal 09 sd. 10 Mei 2024, bertempat di Triiple Tree Kota Bukittinggi yang diikuti oleh sebanyak 150 orang peserta berasal dari Tokoh Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota.
- 9) Tanggal 10 sd. 11 Mei 2024, bertempat di Triiple Tree Kota Bukittinggi yang diikuti oleh sebanyak 150 orang peserta berasal dari Tokoh Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota.
- 10) Tanggal 31 Mei sd. 01 Juni 2024, bertempat di Triiple Tree Kota Bukittinggi yang diikuti oleh sebanyak 150 orang peserta berasal dari Tokoh Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota.
- 11) Tanggal 01 sd. 02 Juni 2024, bertempat di Triiple Tree Kota Bukittinggi yang diikuti oleh sebanyak 150 orang peserta berasal dari Tokoh Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota.

12) Tanggal 02 sd. 03 Juni 2024, bertempat di Triiple Tree Kota Bukittinggi yang diikuti oleh sebanyak 150 orang peserta berasal dari Tokoh Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota.

13) Tanggal 03 sd. 04 Juni 2024, bertempat di Triiple Tree Kota Bukittinggi yang diikuti oleh sebanyak 150 orang peserta berasal dari Tokoh Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota.

c. Materi dan Narasumber

Adapun Materi dan Nara sumber yang disampaikan dalam kegiatan Pendidikan Politik bagi Tokoh Masyarakat di Kabupaten Lima Puluh Kota, terdiri dari :

- Peran Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pemilu/Pilkada, yang disampaikan oleh Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat.
- Pemilu sebagai Wahana Pendidikan Politik, yang disampaikan oleh Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat.
- Pentingnya Pendidikan Politik dalam Pengembangan Budaya Politik yang demokratis, yang disampaikan Akademisi/Dosen Ilmu Politik.
- Pentingnya Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilu Serentak tahun 2024, yang disampaikan oleh Praktisi Politik/Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota.
- Pengawasan Partisipatif Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024, yang disampaikan oleh Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sumatera Barat
- Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024

3. KABUPATEN TANAH DATAR

a. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Pendidikan Politik bagi Tokoh Masyarakat di Kabupaten Dharmasraya pada Tahun 2024 dilaksanakan sebanyak 1 (satu) angkatan dengan jumlah peserta sebanyak 90 (sembilan puluh orang) orang yang berasal dari Tokoh Masyarakat Kabupaten Tanah Datar. Kegiatan Pendidikan Politik bagi Tokoh Masyarakat Kabupaten Dharmasraya dibuka secara resmi oleh Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat

b. Waktu, Tempat dan Peserta Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan Pendidikan Politik bagi Tokoh Masyarakat di Kabupaten Tanah Datar dilaksanakan pada :

3) Tanggal 25 sd. 26 Juli 2024, bertempat di Hotel Emersia Tanah Datar yang diikuti oleh sebanyak 100 orang peserta berasal dari Tokoh Masyarakat Kabupaten Tanah Datar.

c. Materi dan Narasumber

Adapun Materi dan Nara sumber yang disampaikan dalam kegiatan Pendidikan Politik bagi Tokoh Masyarakat di Kabupaten Tanah Datar, terdiri dari :

- Peran Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pemilu/Pilkada, yang disampaikan oleh Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat.
- Pemilu sebagai Wahana Pendidikan Politik, yang disampaikan oleh Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat.
- Pengawasan Partisipatif Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024, yang disampaikan oleh Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sumatera Barat
- Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Telah dilaksanakan Kegiatan Pendidikan Politik bagi Tokoh Masyarakat Kabupaten/Kota, yang terdiri dari :
 - Kabupaten Lima Puluh Kota sebanyak 1200 orang.
 - Kabupaten Dharmasraya sebanyak 150 Orang.
 - Kabupaten Tanah Datar sebanyak 90 orang

B. SARAN

Dalam rangka mewujudkan sistem politik yang demokratis, perlu didukung oleh berbagai elemen, dengan menyelenggarakan pendidikan politik guna meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang politik terutama dalam menghadapi Pemilihan Umum Tahun 2024 sehingga kehidupan demokrasi di Indonesia tercipta dengan baik, yang dilandasi kepentingan bersama dalam meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa. Diharapkan pelaksanaan kegiatan Pendidikan Politik ini dapat dilaksanakan secara berkesinambungan kepada seluruh lapisan masyarakat di seluruh Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.

Padang, Juni 2024

KEPALA BIDANG POLITIK DALAM NEGERI

Drs. STAHLALUDDIN
NIP. 19700730 198902 1 001